

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung
TELUK BETUNG 35215

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami pajatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya jualah sehingga Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat tersusun.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2024 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2024.

Dokumen rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Rencana Strategis Biro Kesra Setda Provinsi Lampung periode 2020-2024 serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Demikian semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanan program kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,**



Dra. YULIA MEGARIA, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680729 198901 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
F. Sumber Daya	5
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS	7
A. Anggaran	7
B. Sarana Pendukung	7
C. Kinerja Pelayanan	9
D. Realisasi Anggaran	22
E. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	23
F. Tujuan dan Sasaran Renja PD	27
G. Program dan Kegiatan	27
BAB III. RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024	35
A. Visi dan Misi	35
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	35
C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis	37
D. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2024	37
BAB IV. PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dalam rangka mencapai visi daerah Lampung yaitu “**Rakyat Lampung Berjaya**”, salah satu misi yang dirumuskan adalah menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai. (Misi-1).

Melalui Misi tersebut, diupayakan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bertatakelola baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka pada Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ditegaskan bahwa kesejahteraan rakyat yang diwujudkan melalui kehidupan yang religius (agamis) menjadi fokus penting pembangunan dalam periode 2019-2024. Kehidupan masyarakat yang religius (agamis) terkait dengan **pertama** sarana dan prasarana tempat peribadatan sebagai fasilitas/wadah bagi umat beragama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan di Provinsi Lampung, **kedua** tentang peningkatan kesejahteraan para tokoh/pemuka agama yang ada di Provinsi Lampung serta para umat beragama dengan penyelenggaraan kegiatan demi mewujudkan Masyarakat Lampung agamis, berbudaya, aman dan damai. **Ketiga** terkait tentang peningkatan motivasi belajar para Tahfidzul Qur'an yang ada di Provinsi Lampung serta para umat beragama

dengan penyelenggaraan kegiatan demi mewujudkan Masyarakat Lampung agamis, berbudaya, aman dan damai.

Dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu disusun suatu rencana aksi yang berisi tujuan, sasaran, indikator, target dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 – 2024.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
6. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Lampung TA 2024.
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Aksi adalah sebagai acuan dalam menjabarkan dari target Penetapan kinerja (PK) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menuangkan pengendalian kinerja organisasinya ke dalam dokumen monitoring dan evaluasi yang disusun secara berkala.

D. Ruang Lingkup

Rencana Aksi meliputi Sasaran, Program dan Kegiatan yang memuat indikator kinerja atau ukuran kinerja hingga kebutuhan dana indikatif. Indikator kinerja ini dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan terhadap pelaksanaan kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Selain itu dijabarkan target dan jadwal kegiatan per triwulan.

E. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung serta diperjelas dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta TataKerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, diuraikan tugas pokok Biro kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah :

“membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar”. Dalam melaksanakan tugas tersebut Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi :

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung terdiri dari :

1. Kepala Biro
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya (Koordinator Substansi Bina Mental Spiritual), membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Sub Koordinator Substansi Kelembagaan Bina Spiritual);
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Sub Koordinator Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual).
4. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya (Koordinator Substansi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar), membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Muda (Sub Koordinator Substansi Kesehatan);
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Sub Koordinator Substansi Sosial); dan
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Sub Koordinator Substansi Pendidikan).
5. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Madya (Koordinator Substansi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar), membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar I);

- b. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar II);
- c. Jabatan Fungsional Perencana Muda (Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Non Dasar III).

F. Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, maka jumlah dan komposisi sumber daya aparatur yang tersedia adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
PNS	0	12	15	0	6	4	2	0	39
PTHL	0	1	7	0	6	4	0	1	19
	0	13	22	0	12	8	2	1	58

2. Berdasarkan Jabatan Struktural, Non-Struktural dan Jenis Kelamin

Pejabat Struktural : 2 orang terdiri dari :

Golongan IV/d	:	-	Golongan IV/c	:	-
Golongan IV/b	:	1 orang	Golongan IV/a	:	-
Golongan III/d	:	1 orang	Golongan III/c	:	-

ESELON II : 1 orang (Perempuan)

ESELON IV : 1 orang (Perempuan)

JF Ahli Madya : 2 orang (Laki - Laki = 2 orang)

JF Ahli Muda : 9 orang (Laki - Laki = 3 orang, Perempuan = 6 orang)

Analisis : 13 orang (Laki - Laki = 3 orang, Perempuan = 10 orang)

Bendahara : 1 orang (Perempuan = 1)

Pengelola : 5 orang (Laki - Laki = 1 orang, Perempuan = 4 orang)

Pengadministrasi : 7 orang (Laki - Laki = 4 orang, Perempuan = 3 orang)

Golongan IV/e	:	0 orang	Golongan IV/d	:	0 orang
Golongan IV/c	:	0 orang	Golongan IV/b	:	3 orang

Golongan IV/a : 7 orang	Golongan III/d : 12 orang
Golongan III/c : 4 orang	Golongan III/b : 4 orang
Golongan III/a : 6 orang	Golongan II/d : 1 orang
Golongan II/c : 0 orang	Golongan II/b : 1 orang
Golongan II/a : 1 orang	Golongan I/d : 0 orang
Golongan I/c : 0 orang	Golongan I/b : 0 orang
Golongan I/a : 0 orang	

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. Anggaran

Sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 89.057.059.028,- (*delapan puluh sembilan miliar lima puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu dua puluh delapan rupiah*) yang terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer	<u>Rp. 30.629.872.000,-</u>
	Rp. 30.629.872.000,-
b. Belanja Operasi	Rp. 76.566.040.000,-
c. Belanja Modal	<u>Rp. 75.774.000,-</u>
Jumlah	Rp. 76.641.814.000,-

Adapun rincian masing-masing belanja adalah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi	
1. Belanja Pegawai	Rp. 274.680.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 66.061.360.000,-
3. Belanja Hibah	Rp. 10.230.000.000,-
b. Belanja Modal	
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 75.774.000,-

B. Sarana Pendukung

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Penunjang lainnya :

- PC/Komputer	= 23 unit
- Laptop	= 11 unit
- Notebook	= 14 unit
- Hard Disk	= 1 unit

- Printer	= 19 unit
- Speaker	= 1 unit
- Server	= 2 unit
- Mesin Tik	= 3 unit
- Mesin Absen	= 2 unit
- Mesin Foto Copy	= 1 unit
- Lemari Besi	= 5 buah
- Lemari Kayu	= 2 buah
- Filling Besi/Metal	= 27 buah
- Brankas	= 2 buah
- Papan Visual	= 1 buah
- Penghancur Kertas	= 4 buah
- OHP	= 3 unit
- Papan Nama Instansi	= 1 buah
- Meja Kayu/Rotan	= 18 buah
- Kursi Besi/Metal	= 16 buah
- Meja Rapat	= 11 buah
- Meja Biro	= 42 buah
- Kursi Rapat	= 65 buah
- Kursi Tamu	= 2 buah
- Kursi Putar	= 42 buah
- Kursi Lipat	= 51 buah
- Sofa	= 1 set
- Lain-lain Meubelair	= 1 buah
- Meja Tulis	= 12 buah
- Kursi Kerja	= 13 buah
- AC	= 10 unit
- Wireless	= 3 unit
- UPS	= 2 unit
- HandyCam	= 4 unit
- Gordyn	= 70 m ²
- Meja Kerja	= 14 buah
- Kursi kerja	= 12 buah

- Lemari Arsip = 4 buah
- Papan Tulis = 3 buah
- Meja Komputer = 1 buah
- Jam Mekanis = 3 buah
- Lambang Burung Garuda = 1 buah
- Gambar Presiden = 1 buah
- Tape Recorder = 2 unit
- Camera = 7 unit
- Faximile = 2 unit

2. Kendaraan Dinas/Operasional :

- Kendaraan Roda Empat (mobil) = 4 unit
- Kendaraan Roda Tiga = 1 unit
- Kendaraan Roda Dua (Motor) = 6 unit

C. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat dilihat dari pencapaian kinerja Biro Kesra pada tahun 2023, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	2023			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persen	98	92,67	94,56	Tinggi

Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Koordinasi, Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan

Sasaran meningkatnya koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan:

Tabel 2.2 Target dan Capaian Realisasi Sasaran 1

Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD/ Renstra 2024	Capaian 2022 terhadap 2024 (%)
				Target	realisasi	%		
Meningkatnya koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persen	97,19	98	92,67	94,56	100	94,56

Pada tabel diatas terlihat bahwa target yang ingin dicapai di akhir tahun 2023 untuk sasaran **Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan** ditetapkan 2023 target sebesar 98%, **Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan. Pertama** di tahun 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melaksanakan implementasi RAN PIJAR melalui UKS/M, selain itu yang **kedua** melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi EKS/M sebanyak 70 orang di Hotel Arinas, **ketiga** melaksanakan Fasilitasi, Koordinasi Pembudayaan Germas pada Pondok Pesantren sebanyak 80 orang di Hotel Horison. **Keempat** Rapat Koordinasi UKS/M 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. **Kelima** hibah UKS/M kepada sekolah-sekolah pemenang Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (LSS-UKS/M) tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional dengan masing-masing sekolah pemenang mendapat @Rp.10.000.000,- total 30 sekolah yang mendapat bantuan hibah uang tunai. Berdasarkan SK Gubernur Lampung No: G/458/B.02/HK/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Uang Sarana dan Prasarana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Tanggamus
 - a. TK Negeri Pembina Tanggamus
 - b. MIN 2 Tanggamus
2. Kabupaten Lampung Timur
 - a. SD Negeri 1 Sidorejo
 - b. SMP Muhammadiyah Al Ghifari
3. Kota Bandar Lampung
 - a. SMP Negeri 16 Bandar Lampung
 - b. SMK Negeri 4 Bandar Lampung
4. Kabupaten Pesisir Barat
 - a. SD Negeri 20 Krui
 - b. SMA Negeri 1 Bangkunt Belimbing
5. Kota Metro
 - a. SD Negeri 11 Kota Metro
 - b. SMP Negeri 5 Metro
6. Kabupaten Way Kanan
 - a. TK Negeri Pembina Blambangan Umpu
 - b. MTs Negeri 1 Way Kanan
7. Kabupaten Lampung Barat
 - a. SMP Negeri 1 Air Hitam
 - b. MAN 1 Lampung Barat
8. Kabupaten Lampung Selatan
 - a. TK Negeri Pembina Tanjung Bintang
 - b. MIN 2 Tanjung Bintang
9. Kabupaten Pesawaran
 - a. TK Hang Tuah Padang Cermin
 - b. SMP Negeri 25 Pesawaran
10. Kabupaten Pringsewu
 - a. MTs Negeri 1 Pringsewu
 - b. SMA Negeri 2 Pringsewu
11. Kabupaten Mesuji
 - a. SMP Negeri 10 Mesuji
 - b. SMA Negeri 1 Mesuji

12. Kabupaten Lampung Utara
 - a. SMP Negeri 1 Abung Semuli
 - b. SMA Negeri 1 Sungkai Utara
13. Kabupaten Lampung Tengah
 - a. SD Negeri 1 Gunung Madu
 - b. SD Negeri 2 Gunung Madu
14. Kabupaten Tulang Bawang
 - a. SD Negeri 1 Bujuk Agung
 - b. SMP Negeri 1 Banjar Margo
15. Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - a. TK Negeri Pembina Tumijajar
 - b. SD Negeri 25 Tulang Bawang Tengah

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Pada tahun 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelembagaan bahasa lampung dengan peserta sebanyak 36 orang dan lomba pemilihan guru bahasa lampung berprestasi tingkat provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur lampung Nomor: G/446/B.02/HK/2023. Juara I tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) berasal dari Tulang Bawang Barat mendapatkan uang pembinaan sebanyak Rp3.500.000,- dan tingkat pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) berasal dari Bandar Lampung dan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp4.500.000,-.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung menyelenggarakan festival qasidah, bintang vokalis dan pop religi. Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/477/B.02/HK/2023 tentang Penetapan Pemenang Festival Seni Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 dapat dirinci untuk juara I masing-masing kategori dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemenang Festival Seni Qasidah Kategori Remaja Putri: berasal dari DPD LASQI kabupaten lampung selatan dan mendapatkan sertifikat, piala serta uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,-;
- b. Pemenang Festival Bintang Vokalis Kategori Remaja Putra: berasal dari kabupaten lampung timur dan mendapatkan sertifikat, piala serta uang pembinaan sebesar Rp2.500.000,-;

- c. Pemenang Festival Bintang Vokalis Kategori Remaja Putri: berasal dari kabupaten lampung timur dan mendapatkan sertifikat, piala serta uang pembinaan sebesar Rp2.500.000,-;
- d. Pemenang Festival Bintang Vokalis Kategori Dewasa Putri: berasal dari kota metro dan mendapatkan sertifikat, piala serta uang pembinaan sebesar Rp2.500.000,-;
- e. Pemenang Festival Bintang Vokalis Kategori Dewasa Putra: berasal dari kota pringsewu dan mendapatkan sertifikat, piala serta uang pembinaan sebesar Rp2.500.000,-;
- f. Pemenang Festival Pop Religi Kategori Remaja Putri: berasal dari kabupaten mesuji dan mendapatkan sertifikat, piala serta uang pembinaan sebesar Rp2.500.000,-;
- g. Pemenang Festival Pop Religi Kategori Remaja Putra: berasal dari kota metro dan mendapatkan sertifikat, piala serta uang pembinaan sebesar Rp2.500.000,-;

Kegiatan seleksi Gita Bahana Nusantara (GBN) tingkat provinsi dan pemberangkatan pemenang GBN ke Istana Negara ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: G/336/B.02/HK/20223 tentang Penunjukan Anggota Paduan Suara Utusan Provinsi Lampung pada Kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2023. Untuk anggota paduan suara gita bahana nusantara utusan provinsi lampung mendapatkan uang pembinaan masing-masing sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung rutin menyelenggarakan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung setiap hari jumat. Pada tahun 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung juga mengadakan pelatihan bagi dewan juri LASQI.

Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual. Pada tahun 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung memberikan bantuan kepada 1.787 lembaga, ormas, pondok pesantren, mushola, masjid, rumah ibadah lainnya, TPA/TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang ada di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat lampung serta mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 ini sebesar 976 unit pada APBD murni

kemudian bertambah 896 unit pada perubahan APBD dan Biro Kesejahteraan Rakyat melalui Sub Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan berhasil mencapai target sebesar 95,46% dengan rincian data penerima bantuan sebagai berikut:

1. Masjid 844 unit;
2. Pondok Pesantren 191 unit;
3. Musholla 482 unit;
4. TPA/TPQ 132 unit;
5. Gereja 33 unit;
6. Pura 79 unit;
7. Lembaga keagamaan 26 lembaga.

Daftar penerima hibah berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/631/B.02/HK/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/189/B.02/HK/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Rumah Ibadah, Pondok Pesantren dan Taman Pendidikan Al-Qur'an Tahun 2023.

Tabel 2.3 Target dan Capaian Kinerja Bantuan Dana Hibah Rumah Ibadah

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	350	350	100%
2	2020	615	615	100%
3	2021	1.124	677	60,23%
4	2022	817	835	97,84%
5	2023	1.872	1.787	95,46%

Sub kegiatan ini mengampu salah satu Agenda Kerja Utama (AKU) Gubernur Lampung yaitu: Lampung Merawat Indonesia. Diharapkan dengan adanya bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah yang ada di Provinsi Lampung dapat memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menagkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.

Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial. Pada tahun 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan ziarah wisata rohani yaitu ziarah wisata untuk semua umat dengan realisasi sebagai berikut:

1. Ziarah Wisata Muslim 1.421 orang;
2. Ziarah Wisata Hindu 90 orang;
3. Ziarah Wisata Buddha 90 orang;
4. Ziarah Wisata Kristen Protestan 90 orang;
5. Ziarah Wisata Katolik 90 orang.

Pada APBD murni, masyarakat yang mengikuti kegiatan wisata rohani tertera dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/627/B.02/HK/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Wisata Rohani Provinsi Lampung Tahun 2023 sebanyak 1.016 orang. Pada APBD perubahan, masyarakat yang mengikuti kegiatan wisata rohani tertera dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/B.02/HK/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta Wisata Rohani Provinsi Lampung Tahun 2023 sebanyak 765 orang.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung mengadakan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada para peserta didik siswa/pelajar/santri sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Lampung sekaligus untuk meningkatkan motivasi belajar para santri, besaran insentif yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per orang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/613/B.02/HK/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Kepada Peserta Didik Siswa/Pelajar/Santri Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, bantuan ini diberikan kepada 50 (lima puluh) orang peserta didik siswa/pelajar/santri.

Fasilitasi kelembagaan bina spiritual. Kegiatan pemberian bantuan kepada para santri hafiz/hafizah yang telah hafal 5 juz, 10 juz, 20 juz dan 30 juz Al Quran dan sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Lampung sekaligus untuk meningkatkan motivasi belajar para santri, besaran insentif yang diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. Adapun persyaratan yang diperlukan, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dengan melampirkan KTP atau Kartu Pelajar bagi santri hafiz/hafizah yang belum berusia 17 tahun;
2. Surat rekomendasi dari Pemda Kabupaten/Kota, kecamatan/kelurahan, Pondok Pesantren atau Lembaga/Badan Hukum yang berkompeten dan menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah benar merupakan

hafidz/hafidzah ditujukan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung;

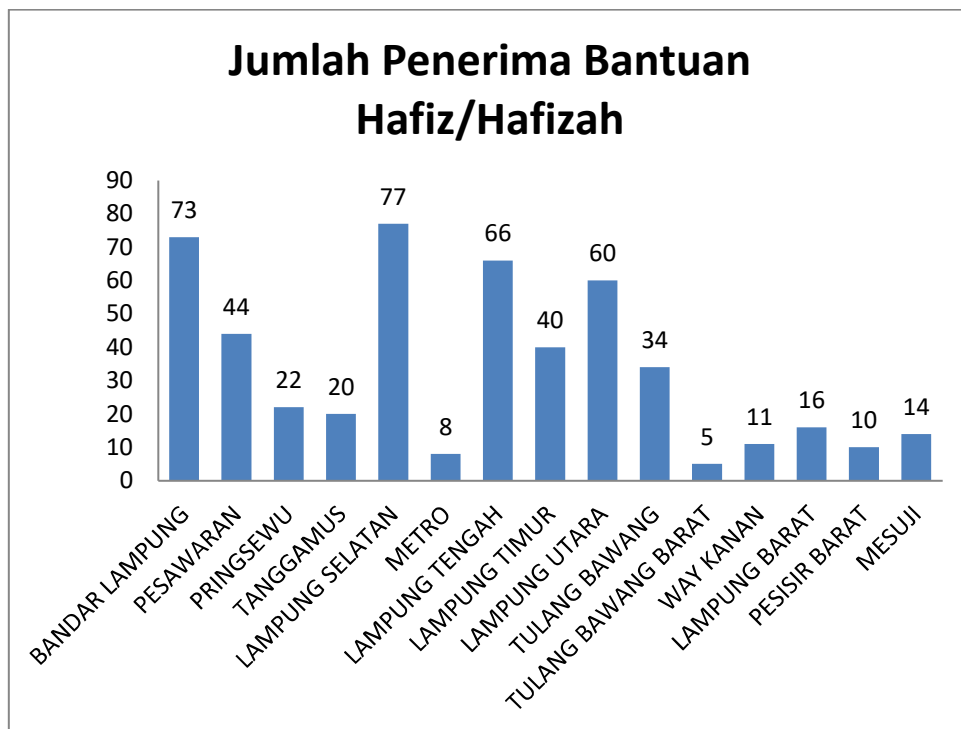
3. Ijazah/Sertifikat/Syahadah;
4. Biodata Diri dan foto berwarna terbaru 2 lembar;
5. Mengisi surat pernyataan;
6. Melampirkan fotocopy buku tabungan Bank Lampung atas nama yang bersangkutan;
7. Lulus verifikasi berkas;
8. Lulus tes lisan (hafalan Al Quran).

Pada APBD murni santri yang menerima bantuan insentif sebanyak 500 orang berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/618/B.02/HK/2023 dengan rincian tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Haflah Tahfizul Qur'an Hafidzh/Hafidzah se-Provinsi Lampung Penerima Bantuan Dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Bandar Lampung sebanyak 73 orang;
2. Kota Metro 8 orang;
3. Kabupaten Pesawaran 44 orang;
4. Kabupaten Tanggamus 20 orang;
5. Kabupaten Pringsewu 22 orang;
6. Kabupaten Lampung Selatan 77 orang;
7. Kabupaten Lampung Utara 60 orang;
8. Kabupaten Lampung Timur 40 orang;
9. Kabupaten Lampung Tengah 66 orang;
10. Kabupaten Tulang Bawang 34 orang;
11. Kabupaten Tulang Bawang Barat 5 orang;
12. Kabupaten Way Kanan 11 orang;
13. Kabupaten Lampung Barat 16 orang;
14. Kabupaten Pesisir Barat 10 orang;
15. Kabupaten Mesuji 14 orang.

Realisasi tahun 2023 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 500 orang terealisasi atau sebesar 100%.

Gambar 2.1 Jumlah penerima bantuan insentif hafiz/hafizah tahun 2023 per kabupaten/kota



Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung mengadakan kegiatan pemberian bantuan kepada guru mengaji, imam masjid, marbot dan muazzin di Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 pada APBD murni mendapat kuota sebanyak 1.800 orang dengan nilai Rp.1.000.000,- per orang kemudian bertambah sebanyak 200 orang pada APBD perubahan dari 15 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 berhasil menyalurkan bantuan insentif untuk guru mengaji, marbot dan muazzin, khatib, imam masjid, bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota kepada 2.000 orang. Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/619/B.02/HK/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Dana Kepada Guru Ngaji, Marbot, Imam Masjid, Pemangku, Guru Pasraman dan Pinandita se-Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Bandar Lampung 329 orang;
2. Kota Metro 124 orang;
3. Kabupaten Lampung Tengah 120 orang;
4. Kabupaten Lampung Selatan 131 orang;
5. Kabupaten Lampung Timur 138 orang;
6. Kabupaten Pesawaran 144 orang;

7. Kabupaten Pringsewu 253 orang;
8. Kabupaten Lampung Utara 70 orang;
9. Kabupaten Tulang Bawang Barat 141 orang;
10. Kabupaten Tulang Bawang 120 orang;
11. Kabupaten Tanggamus 104 orang;
12. Kabupaten Pesisir Barat 61 orang;
13. Kabupaten Mesuji 114 orang;
14. Kabupaten Way Kanan 94 orang;
15. Kabupaten Lampung Barat 57 orang.

Gambar 2.2 Penerima bantuan guru mengaji, imam masjid, marbot dan muazzin



Fasilitasi Jamaah Haji. Pada tahun 2023 dilaksanakan pemberangkatan jamaah haji Provinsi Lampung sebanyak 7.320 orang setelah sempat berhenti selama tiga tahun dikarenakan pandemi Covid-19. Untuk kegiatan ini dilakukan juga rapat koordinasi petugas kloter dan petugas haji daerah (PHD) se-Provinsi Lampung sebanyak 140 orang.

Pemberangkatan Umroh. Pada tahun 2023 terlaksana pemberangkatan umroh untuk masyarakat sebanyak 365 orang. Kegiatan ini dilaksanakan kembali setelah berhenti selama pandemi Covid-19.

Kegiatan Baca Tulis Al Qur'an. Tahun 2023 diadakan kegiatan pelatihan baca tulis al qur'an sebanyak 200 peserta di Hotel Horison.

Kegiatan pengajian. Tahun 2023 diadakan pengajian akbar hampir di 15 kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut:

- Lampung barat : 2 kali
- Pesisir barat : 2 kali
- Way kanan : 2 kali
- Tulang bawang : 2 kali
- Tulang bawang barat : 2 kali
- Metro : 2 kali
- Tanggamus
- PKOR
- Lampung Selatan
- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Lampung Timur

Selain itu diadakan juga pengajian di beberapa pondok pesantren, diantaranya pondok pesantren di lampung utara, pesawaran dan jati agung.

Pembinaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada tahun 2023 kegiatan MTQ ke 50 tingkat Provinsi Lampung terlaksana pada tanggal 11 s.d.14 Oktober 2023 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah tahun 2023 menyelenggarakan kegiatan MTQ tersebar di beberapa tempat di Kota Bandar Lampung dengan melaksanakan penilaian yang ketat sesuai dan peserta terbaik I, II, III pada MTQ ke-50 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023, diantaranya:

1. Cabang Tilawatil Qur'an
 - a. Golongan Tartil Al Qur'an Putri
 - b. Golongan Tartil Al Qur'an Putra
 - c. Golongan Anak-Anak Putri
 - d. Golongan Anak-Anak Putra
 - e. Golongan Remaja Putri
 - f. Golongan Remaja Putra
 - g. Golongan Dewasa Putri
 - h. Golongan Dewasa Putra
 - i. Golongan Cacat Netra Putri
 - j. Golongan Cacat Netra Putra

2. Cabang Qira'at As-Sab'ah
 - a. Golongan Qiro'at Murottal Remaja Putri
 - b. Golongan Qiro'at Murottal Remaja Putra
 - c. Golongan Qiro'at Murottal Dewasa Putri
 - d. Golongan Qiro'at Murottal Dewasa Putra
 - e. Golongan Mujawwad Dewasa Putri
 - f. Golongan Mujawwad Dewasa Putra
3. Cabang Hifzhil Qur'an
 - a. Golongan 1 juz dan Tilawah Putri
 - b. Golongan 1 juz dan Tilawah Putra
 - c. Golongan 5 juz dan Tilawah Putri
 - d. Golongan 5 juz dan Tilawah Putra
 - e. Golongan 10 juz Putri
 - f. Golongan 10 juz Putra
 - g. Golongan 20 juz Putri
 - h. Golongan 20 juz Putra
 - i. Golongan 30 juz Putri
 - j. Golongan 30 juz Putra
4. Cabang Tafsiril Qur'an
 - a. Golongan Bahasa Arab Putri
 - b. Golongan Bahasa Arab Putra
 - c. Golongan Bahasa Indonesia Putri
 - d. Golongan Bahasa Indonesia Putra
 - e. Golongan Bahasa Inggris Putri
 - f. Golongan Bahasa Inggris Putra
5. Cabang Fahmil Qur'an Putri
 - a. Golongan Fahmil Qur'an Putri
 - b. Golongan Fahmil Qur'an Putra
6. Cabang Syarhil
 - a. Golongan Syarhil Qur'an Putri
 - b. Golongan Syarhil Qur'an Putra
7. Cabang Khottil Qur'an
 - a. Golongan Naskah Putri

- b. Golongan Naskah Putra
 - c. Golongan Mushaf Putri
 - d. Golongan Mushaf Putra
 - e. Golongan Dekorasi Putri
 - f. Golongan Dekorasi Putra
 - g. Golongan Kontemporer Putri
 - h. Golongan Kontemporer Putra
8. Musabaqoh Karya Tulis Ilmiah Al-Qur'an
- a. Golongan Musabaqoh Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an Putri
 - b. Golongan Musabaqoh Karya Tulis Ilmiah Al Qur'an Putra
9. Cabang Musabaqoh Al-Hadits
- a. Golongan 100 Hadits Putri
 - b. Golongan 100 Hadits Putra
 - c. Golongan 500 Hadits Putri
 - d. Golongan 500 Hadits Putra

Berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Dewan Hakim MTQ Ke-50 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor: 02/KEP/KORD-DH/MTQ-50/2023 tentang Penetapan Juara Umum dan Peringkat Kejuaraan Daerah Pada MTQ Ke-50 Tahun 2023 di Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

PERINGKAT	KABUPATEN/KOTA
Juara Umum	Kota Bandar Lampung
Peringkat II	Tanggamus
Peringkat III	Metro
Peringkat IV	Pringsewu
Peringkat V	Lampung Tengah
Peringkat VI	Lampung Selatan
Peringkat VII	Lampung Timur
Peringkat VIII	Pesawaran
Peringkat IX	Way Kanan
Peringkat X	Lampung Utara
Peringkat XI	Tulang Bawang Barat
Peringkat XII	Mesuji
Peringkat XIII	Lampung Barat

Peringkat XIV	Tulang Bawang
Peringkat XV	Pesisir Barat

Pada tanggal 28 Oktober s.d 7 November 2023 dilaksanakan MTQ tingkat nasional XXVII tahun 2023 di Provinsi Jambi. Untuk peserta dari Lampung dilakukan seleksi dari juara I tahun 2022, juara I tahun 2021 dan jalur undangan. Selain itu, dilakukan pula *Training Center* (TC) untuk menambah pengetahuan peserta, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) kali, yaitu:

- TC 1 dilaksanakan tanggal 23 s.d 26 Juni 2023 di Hotel Horison
- TC 2 dilaksanakan tanggal 7 s.d 12 Agustus 2023 di Hotel Arinas
- TC 3 dilaksanakan tanggal 25 s.d 27 Oktober 2023 di Hotel De Green

Beberapa peserta perwakilan provinsi lampung berhasil meraih juara harapan di tingkat nasional dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan 1 juz dan tilawah putra : juara harapan I
- Golongan 20 juz putra : juara harapan III
- Golongan 30 juz putra : juara harapan III

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Pada tahun 2023 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan pembinaan pelatihan kader rukun kematian, rakor Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) serta rakor pencegahan pernikahan anak sebanyak 100 orang di Hotel Horison.

D. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung mendapat alokasi Anggaran Belanja Tahun 2023 sebesar **Rp.119.280.974.868,-** terealisasi sebesar **Rp. 106.752.149.705,86 (89,50%)** yang terdiri dari :

- Belanja Langsung sebesar **Rp.119.280.974.868,-** terealisasi sebesar **Rp.106.752.149.705,86 (89,50%).**

Tabel 2.4 Realisasi Anggaran per sasaran strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1.	Meningkatnya koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	119.280.974.868,-	106.752.149.705,86	89,05%
	Total Belanja Langsung		119.280.974.868,-	106.752.149.705,86	89,50%

E. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang ber-basis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Pembangunan nasional saat ini sedang dihadapkan oleh beberapa tantangan, yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Eksternal

Tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal adalah sebagai berikut:

- a. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) serta perekonomian Eropa secara perlahan lepas dari krisis, akan mengakibatkan:
 - Arus modal asing berbalik ke negara maju;
 - Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.
- b. Melepaskan Indonesia dari jerat negara berpendapatan menengah (*Middle-income trap*).

2. Lingkungan Internal

- a. Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan terhadap gejolak global, hal ini artinya bahwa struktur industri manufaktur masih dangkal dan ketergantungan Negara kita terhadap impor barang modal dan bahan setengah jadi masih tinggi.
- b. Iklim usaha dan investasi, serta kepastian hukum masih belum optimal dalam memberikan kemudahan dan kepastian investasi.
- c. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- d. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, demikian juga, kesenjangan antar wilayah juga masih tinggi.

Reformasi pembangunan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (*Middle Income Trap*). RPJMN tahap ketiga (2020-2024) dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek.

Kebijakan Pembangunan Nasional

Secara garis besar kebijakan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan SDM.
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional maka disusunlah 9 bidang pembangunan yang digariskan RPJPN 2005-2025, yaitu sebagai berikut :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Ekonomi
3. Sarana dan Prasarana
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6. Politik
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Hukum dan Aparatur
9. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

Prioritas Pembangunan Nasional

Selanjutnya, Prioritas Pembangunan disusun untuk merespon isu-isu strategis yang teridentifikasi. Dari sembilan bidang pembangunan nasional tersebut, bidang yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah pada bidang pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama serta pada bidang ekonomi. Isu strategis dari bidang pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand dan Supply)
 - b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
 - c. Pengendalian Jumlah Penduduk
 - d. Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
 - e. Optimalisasi Anggaran Pendidikan Ekonomi
2. Isu Strategis Bidang Pembangunan Ekonomi
 - a. Transformasi Struktur Industri
 - b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Dari isu-isu strategis pembangunan nasional diatas, pemerintah daerah perlu menjabarkan prioritas pembangunan nasional tersebut melalui Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan daerah, perlu disusun program-program prioritas pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung tahun 2020-2024.

VISI DAN MISI PROVINSI LAMPUNG

a. Visi

Visi Provinsi Lampung 2020 -2024 adalah ***“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”***

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai
2. Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik
3. Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Kaum Difabel
4. Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah
5. Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024, Misi Provinsi Lampung yang perlu dijabarkan kembali oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah Misi pertama, yaitu:

Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman dan Damai

Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung

Tema dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah

***“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN KUALITAS SDM
MENUJU RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”***

Prioritas Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Pertama : Peningkatan investasi dan nilai tambah produk unggulan;
- Kedua : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Ketiga : Pembangunan infrastruktur;
- Keempat : Reformasi birokrasi;
- Kelima : Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya;
- Keenam : Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Dalam hal ini dari keenam program prioritas pembangunan Provinsi Lampung tersebut, prioritas kelima perlu dijabarkan kembali oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melalui program dan kegiatan, sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

F. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

A. Tujuan

Tujuan dari Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat

B. Sasaran

Sasaran dari Rencana Kerja (Renja) Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, yang menjadi sasarannya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

Melalui perencanaan dan dukungan dana yang memadai maka Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung merumuskan Program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Program

Program Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Kesejahteraan Rakyat.

b. Kegiatan

Berdasarkan program tersebut diatas, kewenangan, tugas, fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
7. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
8. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

c. Sub Kegiatan

Pada tahun 2024 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung melaksanakan 18 sub kegiatan diantaranya:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
12. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual;
13. Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual;
14. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan;

15. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan;
16. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial;
17. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Tabel 2.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	01					SEKRETARIAT DAERAH				39.726.624.688				39.726.624.688
4	01	01				PROGRAM ADMINISTRASI UMUM			100%	823.609.000			100%	823.609.000
4	01	01	1	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras		100%	76.640.600			100%	76.640.600
4	01	01	1	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan biro	Kantor OPD	5 dokumen	33.425.900	Pajak Daerah	-	5 dokumen	33.425.900
4	01	01	1	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Kantor OPD	1 dokumen	18.698.500	Pajak Daerah	-	1 dokumen	18.698.500
4	01	01	1	01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja biro	Kantor OPD	8 laporan	8.152.200	Pajak Daerah	-	8 laporan	8.152.200
4	01	01	1	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Kantor OPD	2 laporan	16.364.000	Pajak Daerah	-	2 laporan	16.364.000
4	01	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan		100%	59.188.100			100%	59.188.100
4	01	01	1	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah dokumen laporan keuangan	Kantor OPD	1 laporan	16.948.000	Pajak Daerah	-	1 laporan	16.948.000

						K keuangan Akhir Tahun SKPD	tahunan biro							
4	01	01	1	02	06	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah pemeriksaan bahan tanggapan yang ditindaklanjuti	Kantor OPD	4 dokumen	13.280.000	Pajak Daerah	-	4 dokumen	13.280.000
4	01	01	1	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran biro	Kantor OPD	12 laporan	28.960.100	Pajak Daerah	-	12 laporan	28.960.100
4	01	01	1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian biro yang disusun sesuai aturan		100%	55.500.000			100%	55.500.000
4	01	01	1	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Provinsi Lampung dan Luar Provinsi	6 orang	55.500.000	Pajak Daerah	-	6 orang	55.500.000
4	01	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi umum biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai aturan		100%	305.289.000			100%	305.289.000
4	01	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kantor OPD	6 paket	42.581.300	Pajak Daerah	-	6 paket	42.581.300
4	01	01	1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kantor OPD	17 laporan	265.819.000	Pajak Daerah	-	17 laporan	265.819.000
4	01	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan umum biro yang		100%	323.880.000			100%	323.880.000

							disusun							
4	01	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan bagi pegawai yang mendapat honorarium	Kantor OPD	12 laporan	323.880.000	Pajak Daerah	-	12 laporan	323.880.000
4	01	04				PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				38.903.015.688				38.903.015.688
4	01	04	1	01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang disalurkan		100%	36.588.015.688			100%	36.588.015.688
4	01	04	1	01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah sarana prasarana rumah ibadah yang diberikan bantuan	15 Kab/Kota	350 unit	10.500.000.000	Pajak Daerah	-	350 unit	10.500.000.000
4	01	04	1	01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah bantuan yang diberikan dan peserta yang mengikuti kegiatan keagamaan	Provinsi Lampung, Luar Provinsi dan Luar Negeri	20 lembaga	26.088.015.688	Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	-	20 lembaga	26.088.015.688
4	01	04	1	02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase bantuan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan		95%	1.430.000.000			95%	1.430.000.000
4	01	04	1	02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan	Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan terkait pendidikan	11 Kab/Kota	1 dokumen	100.000.000	Pajak Daerah	-	1 dokumen	100.000.000

						Rakyat Bidang Pendidikan								
4	01	04	1	02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah koordinasi dan pembinaan promosi kesehatan dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	15 Kab/Kota	1 dokumen	750.000.000	Pajak Daerah	-	1 dokumen	750.000.000
4	01	04	1	02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah bantuan bidang kesejahteraan sosial	15 Kab/Kota	1 dokumen	580.000.000	Pajak Daerah	-	1 dokumen	580.000.000
4	01	04	1	03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase bantuan bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang dilaksanakan		100%	885.000.000			100%	885.000.000
4	01	04	1	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata	Provinsi Lampung dan Luar Provinsi	3 dokumen	700.000.000	Pajak Daerah	-	3 dokumen	700.000.000
4	01	04	1	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan	Jumlah koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan	15 Kab/Kota	1 dokumen	185.000.000	Pajak Daerah	-	1 dokumen	185.000.000

						Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja yang terlaksana								
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024

A. Visi dan Misi

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah salah satu OPD Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki tugas dan kewajiban untuk bersama-sama OPD lainnya mewujudkan misi Provinsi Lampung, tepatnya misi 1 (satu) yaitu: “menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai”. Misi kesatu bertujuan diantaranya mewujudkan kerukunan antar umat beragama yang ada di Provinsi Lampung, melestarikan budaya daerah Lampung melalui kegiatan/festival budaya daerah Lampung serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan umat beragama di Provinsi Lampung Sehingga bukanlah hal yang mudah bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk mewujudkan masyarakat Lampung yang bebas dari konflik agama dan budaya.

Secara spesifik, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan prioritas, yang secara operasional mengacu pada tujuan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2024 yakni Tercapainya Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama melalui Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Keagamaan. Kondisi ini tentunya menuntut kesiapan berbagai sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan dukungan anggaran yang memadai. Beberapa hal tersebut di atas menjadi misi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk berbuat lebih banyak, lebih baik dan nyata dalam meningkatkan peran kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat Pemerintah Provinsi Lampung.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sesuai dengan Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung (2020–2024), tujuan dan sasaran dirumuskan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretraiat Daerah Provinsi Lampung Tahun
2020 - 2024**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya peran kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan daerah bidang kesra yang direalisasikan	Meningkatnya koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persen	100	97,33	97,50	98	100

C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator kinerja sasaran strategis dimaksudkan sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan terhadap pencapaian sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam rangka terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Adapun indikator kinerja dimaksud sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persen	100	97,33	97,50	98	100

D. Rencana Aksi Atas Kinerja Tahun 2024

Rencana aksi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024 meliputi Sasaran, Program dan Kegiatan, indikator kinerja target dan jadwal kegiatan per triwulan hingga kebutuhan dana indikatif. Tahun Anggaran 2024 Biro kesra melaksanakan misi 1 RPJMD, yaitu: **Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai**. Komitmen dalam melaksanakan Misi-1, Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai yang didukung dengan kepastian hukum:

- Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
- Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;

- d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
- e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
- f. Memperkuat komunikasi antarlembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah.

Demi mewujudkan komitmen misi pertama Biro Kesra mempunyai 2 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan pagu total **Rp.76.641.814.000,-** atau target capaian kinerja sasaran tahun 2024 sebesar 100% (rincian target per triwulan terlampir)

- **Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi** dengan indikator persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi pagu tahun 2024 **Rp.823.609.000,-** atau target capaian kinerja 2024 sebesar 100%

- 1) **Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah** dengan indikator persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras target capaian kinerja sebesar 100%

- a. **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah** dengan indikator jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah target 5 dokumen PK 2024 triwulan I, Rencana Aksi 2024 triwulan I, Renja 2025 triwulan I dan II, KUA PPAS TA 2025 dan Perubahan KUA PPAS TA 2024 triwulan III-IV dan Perubahan Renja 2024 triwulan IV;
- b. **Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD** dengan indikator jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD target 2 dokumen

pra RKA TA 2025 triwulan II dan Perubahan RKA TA 2024 triwulan III-IV;

- c. **Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD** dengan indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD target 8 laporan evaluasi renja 2023, evaluasi rencana aksi 2024 triwulan I-IV dan evaluasi renja 2024 triwulan I-IV;
 - d. **Evaluasi kinerja perangkat daerah** dengan indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah target 2 laporan matriks LKPJ tahun 2023 triwulan I dan LKj tahun 2023 triwulan I.
- 2) **Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah** dengan indikator persentase administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan target capaian kinerja sebesar 100%
- a. **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD** dengan indikator jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD target 1 laporan keuangan tahunan biro dan verifikasi laporan keuangan biro;
 - b. **Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan** dengan indikator jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan target 4 dokumen mempersiapkan bahan pemeriksaan dan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
 - c. **Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD** dengan indikator jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD target 12 laporan penyusunan dokumen fungsional administrative bulanan biro.
- 3) **Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah** dengan indikator persentase administrasi kepegawaian biro yang disusun sesuai aturan target capaian kinerja sebesar 100%

- a. **Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi** dengan indikator jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan target pegawai yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi/workshop sebanyak 10 orang pada triwulan II dan III.
- 4) **Kegiatan administrasi umum perangkat daerah** dengan indikator persentase administrasi umum biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai aturan target capaian kinerja sebesar 100%
 - a. **Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor** dengan indikator jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan target 6 paket pengadaan filling cabinet, mesin penghancur kertas, AC split 2 PK, PC all in one 2 unit dan printer pada triwulan IV;
 - b. **Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD** dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD target 17 laporan terkait koordinasi dan perjalanan dinas ke pemerintah pusat serta rapat-rapat kegiatan.
- 5) **Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** dengan indikator persentase layanan jasa penunjang urusan umum biro yang disusun target capaian kinerja sebesar 100%
 - a. **Penyediaan jasa pelayanan umum kantor** dengan indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan target 12 laporan honorarium bagi pengelola keuangan biro, honorarium operator perencanaan dan keuangan non ASN serta jasa kebersihan kantor.
- **Program kesejahteraan rakyat** dengan indikator persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan pagu tahun 2024 **Rp.75.818.205.000,-** atau target kinerja sebesar 100%
 - 1) **Kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual** dengan indikator persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang disalurkan target capaian kinerja 100%
 - a) **Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual** (belanja hibah) pagu **Rp.10.700.000.000,-** dengan indikator jumlah sarana dan

prasarana spiritual yang dikelola target murni tahun 2024 sebanyak 441 unit rumah ibadah dan lembaga keagamaan yang ada di Provinsi Lampung dan distribusi bantuan hibah akan dilaksanakan pada triwulan III, sub kegiatan ini mengampu salah satu Agenda Kerja Utama (AKU) Gubernur Lampung, yaitu **Lampung Merawat Indonesia**: memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Musholla 109 unit masing-masing Rp.10.000.000,-
2. Masjid 207 unit masing-masing Rp.15.000.000,-
3. Pondok Pesantren 24 unit masing-masing Rp.25.000.000,-
4. Rumah Ibadah Lainnya 44 unit (Gereja 4 unit dan Pura 40 unit) masing-masing Rp.15.000.000,-
5. TPA/TPQ 27 unit masing-masing Rp.10.000.000,-
6. Masjid Safari Ramadan 16 unit masing-masing Rp.30.000.000,-
7. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Rp.2.500.000.000,-
8. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rp.300.000.000,-
9. Muhammadiyah Rp.200.000.000,-
10. Nahdlatul Ulama (NU) Rp.200.000.000,-
11. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rp.300.000.000,-
12. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Rp.150.000.000,-
13. Muslimat NU Rp.50.000.000,-
14. Fatayat NU Rp.50.000.000,-
15. Peradah Rp.50.000.000,-
16. Masjid Al Hikmah Kel. Way Dadi Baru Kec. Sukarame Rp.50.000.000,-
17. Masjid Al Fala Desa Muara Jaya Rp.25.000.000,-
18. Masjid Al Hidayah Desa Sungai Sidang Rp.25.000.000,-

19. Masjid Al Barokah Jalan Abdul Muis Kel. Gedong Meneng
Kec. Rajabasa Rp.25.000.000,-

20. Masjid Miftahul Jannah Pekon Walur Kec. Krui Selatan
Rp.100.000.000,-

Pelaksanaan bantuan hibah uang tunai untuk rumah ibadah dan lembaga keagamaan ini dimulai dengan verifikasi terkait berkas proposal calon penerima bantuan hibah yang akan dilakukan pada triwulan I dan II kemudian setelah berkas proposal diverifikasi selanjutnya Biro Kesra mengusulkan proposal kepada Gubernur Lampung pada triwulan II dan III. Pencairan dana bantuan hibah akan dilaksanakan pada Triwulan II s.d IV sebanyak 441 unit rumah ibadah dan lembaga keagamaan kemudian pada akhir tahun dan awal tahun berikutnya akan dilakukan pengumpulan berkas laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah serta monitoring langsung ke lokasi penerima bantuan.

b) Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual dengan indikator jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi target 9 lembaga, sub kegiatan ini mengampu 2 Agenda Kerja Utama (AKU) Gubernur Lampung, pagu **Rp.61.173.205.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas jamaah haji provinsi lampung 7.600 orang

Rangkaian proses pemberangkatan jamaah haji asal Provinsi Lampung dimulai dengan pengadaan sewa angkutan darat dan udara haji pada bulan April atau triwulan II juga dilakukan manasik jamaah haji di Islamic Center, pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji kloter I akan dimulai pada bulan Mei s.d Juli atau triwulan III.

2. Bantuan insentif untuk guru ngaji, penjaga masjid dan rumah ibadah lainnya, muazin, khatib, imam masjid, bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota 500 orang @Rp.1.000.000,- (**Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga**

Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota) penerimaan berkas persyaratan calon penerima bantuan serta verifikasi dilakukan dari Bulan Januari sampai dengan Juni selanjutnya seremonial dan pencairan dana pada triwulan II untuk APBD murni sedangkan perubahan APBD pada triwulan IV.

3. Bantuan insentif untuk Tahfidzul Qur'an 100 orang @Rp.3.000.000,- (**Lampung Mengaji:** memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafalan Al-Quran dan mendirikan Pusat Studi Al-Quran), verifikasi berkas persyaratan peserta hafiz/hafidzah dilaksanakan pada triwulan I dan II, selanjutnya akan dilaksanakan validasi lisan kepada peserta yang lulus verifikasi berkas pada triwulan II beserta dengan pelaksanaan seremoni dan pencairan dana.
4. Pengajian Akbar Provinsi Lampung di 5 lokasi kabupaten/kota;
Rapat persiapan pengajian akbar dilakukan pada triwulan I dan untuk Pelaksanaan ny dimulai dari Bulan Februari s.d Juni.
5. Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional;
Training Center (TC) MTQ Tingkat Provinsi Lampung dilaksanakan pada triwulan II sedangkan lomba MTQ Tingkat Provinsi akan dilaksanakan pada triwulan IV antara Bulan Oktober-Desember.
6. Pemberangkatan Umroh 272 orang.
Rapat persiapan pemberangkatan umroh pada Januari-Februari atau triwulan I, penerimaan berkas administrasi peserta umroh dan SK para peserta terlaksana pada triwulan II.
7. Bantuan Operasional Islamic Center Provinsi Lampung terbagi dari triwulan I-IV.

8. Safari Ramadan bersama jajaran Forkopimda dilaksanakan pada Bulan Maret s.d April 2024.

2) **Kegiatan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar** dengan indikator kinerja persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan target capaian kinerja 95%

a. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan target 1 dokumen pagu **Rp.150.000.000,-**

1. Sosialisasi Penguatan Mental Remaja di Provinsi Lampung.

Kegiatan akan terlaksana pada Perubahan APBD di triwulan IV dengan peserta siswa dari sekolah di 15 kabupaten/kota.

b. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan target 1 dokumen pagu **Rp.750.000.000,-**

1. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pada pondok pesantren akan dilaksanakan pada bulan Mei atau triwulan II;

2. Lomba Sekolah Sehat UKS/M Tingkat Provinsi Lampung direncanakan pada bulan Agustus atau triwulan III.

c. Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial dengan target indikator jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial target 1 dokumen pagu **Rp.1.780.000.000,-**

1. Ziarah Wisata Rohani Muslim 420 orang;

2. Ziarah Wisata Rohani Kristen 25 orang;

3. Ziarah Wisata Rohani Katolik 25 orang;
4. Ziarah Wisata Rohani Hindu 25 orang;
5. Ziarah Wisata Rohani Buddha 25 orang.

Direncanakan pengadaan lelang dilakukan pada Bulan April dan pemberangkatan ziarah wisata rohani terlaksana pada Bulan April-Juni, kegiatan pembagian bantuan kepada santri akan dilakukan pada perubahan APBD 2024.

- 3) **Kegiatan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar** dengan indikator kinerja persentase bantuan bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang dilaksanakan target capaian kinerja 100%

- a. **Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata** pagu **Rp.930.000.000,-** dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata target 3 dokumen rincian sebagai berikut:

1. Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung terlaksana dari Bulan Januari-Desember 2024;
2. Lomba Guru Bahasa Lampung Berprestasi terlaksana pada triwulan III;
3. Seleksi Gita Bahana Nusantara (GBN) tingkat provinsi dan pemberangkatan pemenang GBN ke Istana Negara, pemberangkatan peserta GBN dilakukan pada hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Istana Negara;
4. Festival Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi dilaksanakan pada triwulan II dan IV.

- b. **Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan**

Tenaga Kerja dengan indikator kinerja jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja target 1 dokumen pagu **Rp.335.000.000,-**

1. Pembinaan Pelatihan Kader Rukun Kematian direncanakan terlaksana pada triwulan II;
2. Rakor Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) direncanakan terlaksana pada triwulan II/III;
3. Rakor Pencegahan Pernikahan Anak direncanakan terlaksana pada triwulan II.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun sebagai acuan bagi semua satuan kerja dilingkungan Biro Kesra Daerah Provinsi Lampung dan semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Rencana Aksi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dimasing-masing bidang Tahun 2024. Selain itu Rencana Aksi diharapkan mampu menjawab tantangan, hambatan, dinamika dan kebutuhan organisasi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan keagamaan di Provinsi Lampung dalam rangka mendukung terciptanya peningkatan pelayanan publik dan *Good Governance*.

Bandar Lampung, Februari 2024

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA PROVINSI LAMPUNG,**
Dra. YULIA MEGARIA, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19680729 198901 2 001

RENCANA AKSI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/TW	KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/TW	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	TW	TARGET/TW	AKSI SUB KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14	15	16	17	18		19	20	21	22
1	Meningkatnya koordinasi, pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Persentase pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial dan keagamaan	1	15%	Program kesejahteraan rakyat	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang tersalurkan	1	7%	Fasilitasi pembinaan mental spiritual	Persentase bantuan bidang kesejahteraan sosial & keagamaan yang disalurkan	1	15%	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	1	0 unit	1	Verifikasi berkas proposal bantuan rumah ibadah				
			2	55%			2	62%			2	76%			2	0 unit	2	Mengusulkan proposal kepada Gubernur Lampung				
			3	80%			3	89%			3	99%			3	441 unit	3	Pencairan dana bantuan hibah				
			4	100%			4	100%			4	100%			4	441 unit	4	Menyusun dan memverifikasi berkas pertanggungjawaban				
																	5	Monitoring dan evaluasi rumah ibadah yang telah mendapat bantuan				
													Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	1	0 lembaga	1	Verifikasi berkas persyaratan peserta hafizh/hafizhah				
															2	4 lembaga	2	Validasi peserta hafizh/hafizhah				
															3	9 lembaga	3	Pelaksanaan seremoni/symbolis hafizh/hafizhah				
															4	9 lembaga	4	Pelatihan bagi tokoh-tokoh agama di Provinsi Lampung				
																	1	Bantuan operasional Islamic Center				
																	2	Laporan pertanggungjawaban bantuan operasional Islamic				
																	1	MTQ tingkat Provinsi Lampung				
																	2	TC peserta untuk MTQ tingkat nasional				
																	3	MTQ tingkat Nasional				
																	4	Laporan pertanggungjawaban kegiatan MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional				
																	1	Safari Ramadan jajaran Forkopimda				
																	2	Kegiatan keagamaan hari-hari besar islam				
																	3	Laporan pertanggungjawaban kegiatan safari ramadan dan PHBI				
																	1	Pengadaan sewa angkutan darat dan udara haji				
																	2	Fasilitasi manasik jamaah haji di Islamic Center				
																	3	Pemberangkatan jamaah haji Provinsi Lampung				
																	4	Penjemputan jamaah haji dari embarkasi antara di Jakarta				
																	1	Rapat persiapan pengajian bulanan ke 15 kabupaten/kota				
																	2	Pengajian bulanan 15 kabupaten/kota				
																	3	Laporan pertanggungjawaban kegiatan pengajian bulanan				
																	1	Rapat persiapan pemberangkatan umroh				

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET /TW	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	TW	TARGET/T W	AKSI SUB KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14	15	16	17	18		19	20	21	22
																	2	SK peserta umroh				
																	3	Pemberangkatan umroh				
																	4	Laporan Pertanggungjawaban kegiatan umroh				
									Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase bantuan dan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang disalurkan	1	2%	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1	0 dokumen	1	Rapat persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan mental remaja di Provinsi Lampung				
											2	50%			2	0 dokumen	2	Pelaksanaan sosialisasi penguatan mental remaja di Provinsi Lampung				
											3	80%			3	0 dokumen	3	Laporan pertanggungjawaban kegiatan sosialisasi penguatan mental remaja di Provinsi Lampung				
											4	95%			4	1 dokumen	4					
													Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1	0 dokumen	1	Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pada pondok pesantren				
															2	0 dokumen	2	Lomba Sekolah Sehat UKS/M Tingkat Provinsi Lampung				
															3	0 dokumen	3	Laporan pertanggungjawaban kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan kesra bidang kesehatan				
															4	1 dokumen						
													Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	0 dokumen	1	Proses lelang pemberangkatan peserta ziarah wisata 5 agama dalam negeri				
															2	0 dokumen	2	Pemberangkatan peserta ziarah wisata 5 agama dalam negeri				
															3	0 dokumen	3	Pembagian bantuan kepada santri				
															4	1 dokumen	4	Laporan pertanggungjawaban kegiatan bidang sosial				
									Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase bantuan bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang dilaksanakan	1	3%	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	0 dokumen	1	Senam Kesegaran Jasmani ASN di Lapangan Korpri				
											2	60%			2	1 dokumen	2	Festival Qasidah, Bintang Vokalis dan Pop Religi				
											3	90%			3	2 dokumen	3	Gita Bahana Nusantara (GBN)				
											4	100%			4	3 dokumen	4	Lomba Guru Bahasa Lampung Berprestasi				
																	5	Laporan pertanggungjawaban kegiatan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga				
													Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	1	0 dokumen	1	Rakor Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)				
																	2	Pembinaan Pelatihan Kader Rukun Kematian				

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET /TW	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	TW	TARGET/T W	AKSI SUB KEGIATAN	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14	15	16	17	18	19	20	21	22	
													Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3	0 dokumen	3	Rakor Pencegahan Pernikahan Anak				
													4	1 dokumen	4	Laporan pertanggungjawaban kebijakan kesejahteraan rakyat bidang PPPA						
					program penunjang urusan pemerintahan daerah daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	24%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi biro yang selaras	1	40%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	3 dokumen	1	Penyusunan dokumen PK 2024				
							2	47%			2	4 dokumen			2	Penyusunan dokumen Rencana Aksi 2024						
							3	70%			3	5 dokumen			3	Penyusunan Dokumen Renja 2025						
							4	100%			4	5 dokumen			4	Penyusunan dokumen KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dan KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024						
											5	Penyusunan dokumen Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024										
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	0 dokumen	1	Penyusunan dokumen Pra-RKA Tahun Anggaran 2025											
								2	1 dokumen	2	Penyusunan dokumen RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024											
								3	2 dokumen													
								4	2 dokumen													
							Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	2 laporan	1	Penyusunan dokumen Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2023 Triwulan IV											
								2	4 laporan	2	Penyusunan dokumen Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2024											
								3	6 laporan	3	Penyusunan dokumen Evaluasi Rencana Aksi Tahun Anggaran 2024											
								4	8 laporan													
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	2 laporan	1	Penyusunan Matriks LKPJ Tahun 2023												
							2	2 laporan	2	Penyusunan dokumen LKj 2023												
							3	2 laporan														
							4	2 laporan														
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan biro yang disusun sesuai aturan	1	25%	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0 laporan	1	Penyusunan Laporan Keuangan Biro								
							2	50%			2	0 laporan	2	Verifikasi Laporan Keuangan Biro								
							3	75%			3	0 laporan										
							4	100%			4	1 laporan										
									Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1 dokumen	1	Mempersiapkan bahan pemeriksaan yang diperlukan								
											2	2 dokumen	2	Melakukan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan								
											3	3 dokumen										
											4	4 dokumen										
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ Tahunan	1	3 laporan	1	Penyusunan dokumen fungsional administratif bulanan biro								

No	SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN				SUB KEGIATAN				AKSI		JADWAL PELAKSANAAN			
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TW	TARGET/ TW	PROGRAM	INDIKATOR	TW	TARGET/ TW	KEGIATAN	INDIKATOR KEG	TW	TARGET/ TW	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	TW	TARGET/ TW	AKSI SUB KEGIATAN		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14	15	16	17	18		19	20	21	22
													Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	6 laporan	2	Melakukan verifikasi fungsional administratif				
															3	9 laporan						
															4	12 laporan						
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian biro yang disusun sesuai aturan	1	20%	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	2 orang	1	Pendidikan dan pelatihan formal dan informal pegawai				
											2	60%			2	6 orang						
											3	100%			3	10 orang						
											4	100%			4	10 orang						
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum biro yang dilaksanakan dan disusun sesuai aturan	1	9%	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0 paket	1	Pengadaan filling cabinet, dan mesin penghancur kertas				
											2	35%			2	0 paket	2	Pengadaan AC Split 2 PK				
											3	61%			3	0 paket	3	Pengadaan PC All In One dan printer				
											4	100%			4	6 paket						
													Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2 laporan	1	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kesra ke kabupaten/kota				
															2	8 laporan	2	Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat				
															3	14 laporan	3	Mengadakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat/bimtek/workshop				
															4	17 laporan	4	Rapat-rapat internal Biro Kesra				
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan umum biro yang disusun	1	25%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	3 laporan	1	honorarium bagi pengelola keuangan daerah				
											2	50%			2	6 laporan	2	honorarium operator perencanaan dan keuangan biro				
											3	75%			3	9 laporan	3	Jasa kebersihan kantor				
											4	100%			4	12 laporan	4	Penyediaan jasa pengelola arsip kantor				


 Bandar Lampung, Februari 2024
 KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
Dra. YULIA MEGARIA, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NTP 19680729 198901 2 001